

Edukasi dan Tata Kelola Desa Wisata dalam pengembangan Pariwisata Desa di Desa Wisata Salawu Kabupaten Tasikmalaya

Putri Mutiara Rakista¹, Laela Susanto², Syamsu Nurkarim³, Yudi Yulsana⁴

¹⁻⁴Universitas Mayasari Bakti, Tasikmalaya, Indonesia, email: putrimutiara514@gmail.com



Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel Diterima : 28 Februari 2026 Revisi : 23 Juni 2026 Dipublikasikan : 15 Juli 2026	Desa Wisata Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, memiliki potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif, tetapi pengembangannya masih terkendala oleh keterbatasan pemahaman masyarakat, tata kelola kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan pemasaran digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui Participatory Rural Appraisal (PRA), meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Mitra kegiatan meliputi Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai konsep desa wisata, tata kelola, hospitality, paket wisata, dan pemasaran digital. Program ini memperkuat kolaborasi dan tata kelola sebagai dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Kata kunci: Desa Wisata Pemberdayaan Masyarakat Tata Kelola Participatory Rural Appraisal, Pemasaran Digital.	ABSTRACT <i>Education and Governance of Tourism Villages in the Development of Village Tourism in Salawu Tourism Village, Tasikmalaya Regency</i> Salawu Tourism Village in Tasikmalaya Regency possesses significant natural, cultural, and creative economy potential. However, its development continues to face challenges, including limited community understanding, institutional governance, human resource capacity, and digital marketing. This community service activity aimed to enhance community capacity in tourism village management through community empowerment-based education, training, and mentoring. The method employed a participatory approach using Participatory Rural Appraisal (PRA), comprising needs identification, planning, training, mentoring, and evaluation. The activity partners included the Village Government, Village-Owned Enterprise (BUMDes), Tourism Awareness Group (Pokdarwis), and the local community. The results indicated increased understanding of the concepts of tourism villages, governance, hospitality, tourism packages, and digital marketing. The program strengthened collaboration and governance as a foundation for sustainable tourism development.
Keywords: Tourism village Community empowerment Governance Participatory Rural Appraisal Digital marketing.	

Pendahuluan

Desa Salawu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata karena didukung oleh panorama alam pegunungan, budaya Sunda yang masih

terpelihara, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian dan kerajinan anyaman. Selain berada pada jalur penghubung Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Desa Salawu juga memiliki berbagai potensi wisata alam, budaya, dan kehidupan masyarakat pedesaan yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi pembangunan yang mampu meningkatkan perekonomian lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Wisnumurti et al. (2020) menjelaskan bahwa desa wisata memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan potensi wisata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola destinasi wisata (Sulaiman et al., 2022).

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), tim pengabdian melakukan observasi lapangan, wawancara dengan Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta diskusi dengan masyarakat Desa Salawu untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan mitra. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Salawu masih menghadapi beberapa kendala mendasar. Sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep desa wisata berbasis masyarakat sehingga partisipasi dalam pengelolaan destinasi masih relatif rendah. Selain itu, tata kelola kelembagaan antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan BUMDes belum berjalan secara terintegrasi sehingga belum terdapat pembagian tugas dan mekanisme koordinasi yang jelas dalam pengelolaan destinasi wisata. Dari aspek pemasaran, promosi destinasi masih dilakukan secara konvensional dan belum memanfaatkan media digital secara optimal sehingga potensi wisata Desa Salawu belum dikenal secara luas. Kondisi tersebut diperkuat dengan masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pelayanan wisata, pengelolaan homestay, penyusunan paket wisata, serta pemasaran digital. Di samping itu, beberapa fasilitas pendukung seperti area parkir, sanitasi, papan informasi, dan fasilitas wisata lainnya masih memerlukan pengembangan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Salawu memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan tata kelola kelembagaan. Menurut Herlambang et al. (2023), keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh penerapan *collaborative governance*, yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan. Temuan serupa juga disampaikan oleh Nurwanda et al. (2024) yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu faktor yang menghambat pengembangan desa wisata di Kabupaten Ciamis. Selain itu, Zainal et al. (2022) menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata melalui pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat, meskipun tantangan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya tetap memerlukan perhatian berkelanjutan (Aryadi, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi dan pelatihan tata kelola desa wisata yang melibatkan Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis, serta masyarakat Desa Salawu sebagai mitra utama. Materi yang diberikan meliputi konsep desa wisata, tata kelola kelembagaan, pengembangan paket wisata, pelayanan wisata (*hospitality*), pengelolaan homestay, serta pemasaran digital berbasis media sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif sehingga masyarakat tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga terlibat dalam proses identifikasi masalah, penyusunan solusi, dan penyusunan rencana pengembangan desa wisata.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara profesional melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan tata kelola kelembagaan desa wisata. Secara khusus, luaran yang ditargetkan meliputi meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tata kelola desa wisata, meningkatnya kemampuan peserta dalam melakukan

promosi digital destinasi wisata, terbentuknya koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis, serta tersusunnya rekomendasi strategi pengembangan Desa Wisata Salawu yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi terhadap pengembangan Desa Wisata Salawu sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Desa Wisata Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif melalui metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra utama dalam setiap tahapan kegiatan sehingga masyarakat berperan aktif dalam proses identifikasi masalah, penyusunan solusi, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan partisipatif dinilai mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program yang dijalankan serta memperkuat keberlanjutan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat (Lubis et al., 2020; Sulaiman et al., 2022). Selain itu, pendekatan kolaboratif sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam mewujudkan tata kelola desa wisata yang berkelanjutan (Wisnumurti et al., 2020; Herlambang et al., 2023; Nurwanda et al., 2024).

Tahap awal kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan mitra melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok (*focus group discussion*) bersama Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi wisata, mengidentifikasi kondisi infrastruktur pendukung, serta menggali berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan desa wisata. Tahapan identifikasi kebutuhan merupakan bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat karena program yang disusun harus berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat setempat agar menghasilkan intervensi yang tepat sasaran (Aryadi, 2022; Budiarta & Suardana, 2023).

Selanjutnya dilakukan tahap perencanaan program, yaitu penyusunan jadwal kegiatan, pembagian tugas tim pengabdian, serta koordinasi dengan Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat. Pada tahap ini juga dilakukan penyepakatan bentuk kegiatan, peserta pelatihan, serta mekanisme pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan mitra dan kondisi lapangan. Perencanaan secara partisipatif diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan sebagaimana dikemukakan oleh Rahmawati dan Fandeli (2024) mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa wisata.

Tahap pelaksanaan difokuskan pada kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan yang diselenggarakan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan praktik langsung. Materi pelatihan meliputi konsep desa wisata berbasis masyarakat, tata kelola kelembagaan desa wisata, pengelolaan keuangan sederhana, pemasaran digital, pelayanan wisata (*hospitality*), pengelolaan homestay, penyusunan paket wisata, serta pengelolaan lingkungan wisata. Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyusun rancangan paket wisata berbasis potensi lokal yang mencakup wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata alam sebagai bentuk implementasi materi yang telah diperoleh. Penyusunan materi pelatihan mengacu pada prinsip *community-based tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata sehingga manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan (ASEAN Secretariat, 2022; Goodwin, 2023; United Nations Development Programme [UNDP], 2022). Sementara itu, penguatan kompetensi pemasaran digital mengacu pada strategi pengembangan desa wisata yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi destinasi (Sutiarso & Manaf, 2023; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2023).

Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif para mitra. Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan kebijakan, data potensi desa, serta

memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan. BUMDes berperan dalam memberikan masukan mengenai aspek pengelolaan usaha desa dan pengembangan ekonomi berbasis pariwisata. Pokdarwis berfungsi sebagai mitra utama dalam implementasi kegiatan karena terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi wisata, penyusunan paket wisata, serta simulasi pelayanan wisatawan. Sementara itu, masyarakat berpartisipasi sebagai peserta pelatihan sekaligus pelaku utama yang mengimplementasikan hasil kegiatan melalui pengembangan produk wisata, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Kolaborasi antara Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, dan tim pengabdian menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola desa wisata yang efektif dan berkelanjutan. Model kolaborasi tersebut sesuai dengan konsep tata kelola desa wisata yang dikembangkan oleh Wisnumurti et al. (2020), Herlambang et al. (2023), dan Nurwanda et al. (2024).

Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan melalui observasi selama pelaksanaan kegiatan, diskusi reflektif bersama peserta, serta pemberian pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Selain itu, tim pengabdian melakukan penilaian terhadap kemampuan peserta dalam menyusun paket wisata, memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi, serta memahami pembagian peran kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan pendampingan lanjutan bagi Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis agar pengembangan Desa Wisata Salawu dapat berjalan secara berkelanjutan. Pendekatan evaluasi tersebut sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menekankan adanya peningkatan kapasitas (*capacity building*) sebagai indikator keberhasilan program pengabdian (Sulaiman et al., 2022; Budiarta & Suardana, 2023; United Nations World Tourism Organization [UNWTO], 2023).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Desa Wisata Salawu, Kabupaten Tasikmalaya dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku UMKM, serta masyarakat sebagai mitra utama. Program disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan melalui observasi lapangan dan wawancara yang menunjukkan bahwa Desa Wisata Salawu memiliki potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang cukup besar, namun belum didukung oleh tata kelola kelembagaan yang optimal, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, serta strategi promosi yang efektif. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wisata yang dimiliki belum mampu memberikan dampak ekonomi secara maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian melaksanakan program edukasi, pelatihan, dan pendampingan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Materi yang diberikan meliputi konsep desa wisata, tata kelola kelembagaan, pengelolaan keuangan sederhana, pelayanan wisata (*hospitality*), pengelolaan homestay, penyusunan paket wisata, pemasaran digital, serta strategi branding destinasi. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara partisipatif melalui diskusi kelompok, praktik langsung, simulasi pelayanan wisata, dan pendampingan penyusunan rencana pengembangan desa wisata.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep Desa Wisata

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep desa wisata dan pentingnya pengelolaan destinasi secara berkelanjutan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memandang desa wisata hanya sebagai lokasi wisata alam, sedangkan setelah mengikuti pelatihan peserta mulai memahami bahwa desa wisata merupakan sistem pengelolaan destinasi yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, ekonomi kreatif, dan partisipasi masyarakat sebagai satu kesatuan. Perubahan pemahaman tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi wisata desa serta menyusun alternatif program pengembangan destinasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan edukasi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kemampuan lokal (*capacity building*).

Menurut Sulaiman et al. (2022), pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola desa wisata secara mandiri. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Lubis et al. (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal.

Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Desa Wisata

Selain meningkatkan kapasitas individu, kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap penguatan tata kelola kelembagaan desa wisata. Selama proses diskusi dan pendampingan, Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan BUMDes menyusun pembagian peran yang lebih jelas dalam pengelolaan destinasi wisata. Pemerintah Desa berperan dalam penyusunan kebijakan dan dukungan regulasi, BUMDes diarahkan sebagai pengelola unit usaha wisata desa, sedangkan Pokdarwis bertanggung jawab terhadap operasional pelayanan wisata dan pengembangan paket wisata.

Penguatan koordinasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan dibandingkan sebelum program dilaksanakan. Kondisi ini merupakan implementasi konsep collaborative governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan desa wisata (Herlambang et al., 2023). Hasil kegiatan ini juga mendukung penelitian Nurwanda et al. (2024) yang menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata karena setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang saling melengkapi.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan yang diberikan selama kegiatan juga meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pelayanan wisata, pengelolaan homestay, serta penyusunan paket wisata berbasis potensi lokal. Peserta memperoleh pengalaman praktik mengenai penyusunan alur perjalanan wisata, pelayanan kepada wisatawan, serta pengemasan atraksi wisata budaya, kuliner, dan wisata alam menjadi paket wisata yang lebih menarik.

Kemampuan tersebut menjadi modal awal bagi masyarakat untuk mengembangkan produk wisata yang lebih kompetitif. Aryadi (2022) menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola desa wisata yang baik (good governance). Demikian pula, Zainal et al. (2022) menyatakan bahwa pelatihan kepada Kelompok Sadar Wisata mampu meningkatkan profesionalisme masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan.

Peningkatan Kemampuan Pemasaran Digital dan Branding Destinasi

Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi sebelum pelaksanaan program adalah belum optimalnya promosi Desa Wisata Salawu melalui media digital. Sebagian besar promosi masih dilakukan secara konvensional sehingga jangkauan informasi mengenai potensi wisata desa masih terbatas.

Melalui pelatihan pemasaran digital, peserta memperoleh pengetahuan mengenai strategi branding destinasi, pemanfaatan media sosial, pembuatan konten promosi, teknik fotografi sederhana, serta penyusunan narasi promosi yang menarik. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengidentifikasi identitas destinasi yang menjadi keunggulan Desa Wisata Salawu serta mulai menyusun konsep promosi digital berbasis media sosial.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing desa wisata. Menurut UNWTO (2023), transformasi digital merupakan salah satu strategi utama dalam pengembangan destinasi wisata pedesaan karena mampu memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan akses wisatawan terhadap informasi destinasi. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2023) juga menekankan bahwa penguatan branding digital menjadi salah satu indikator keberhasilan pengembangan desa wisata berkelanjutan.

Evaluasi Keberhasilan Program

Evaluasi program dilakukan melalui observasi selama pelaksanaan kegiatan, diskusi reflektif bersama peserta, serta pemberian pre-test dan post-test untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta pada seluruh materi yang diberikan. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama proses pelatihan yang terlihat dari keaktifan dalam diskusi, praktik penyusunan paket wisata, serta penyampaian berbagai gagasan pengembangan Desa Wisata Salawu. Ringkasan perubahan kondisi mitra setelah pelaksanaan program disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Kondisi Mitra Setelah Pelaksanaan Program

Aspek	Sebelum Program	Setelah Program
Pemahaman konsep desa wisata	Masih terbatas	Meningkat dan lebih komprehensif
Tata kelola kelembagaan	Belum memiliki pembagian peran yang jelas	Memahami fungsi Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis
Kapasitas SDM	Belum pernah memperoleh pelatihan	Memiliki keterampilan dasar pelayanan wisata dan pengelolaan homestay
Promosi digital	Masih konvensional	Memahami branding dan pemasaran digital
Kolaborasi	Koordinasi belum optimal	Terbangun komitmen bersama dalam pengembangan desa wisata

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas individu sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan desa. Temuan ini memperkuat hasil pengabdian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan potensi lokal mampu meningkatkan keberlanjutan pengelolaan desa wisata.

Tantangan dan Implikasi Keberlanjutan Program

Meskipun kegiatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, beberapa tantangan masih ditemukan selama pelaksanaan program. Tingkat partisipasi sebagian masyarakat masih belum optimal karena adanya anggapan bahwa kegiatan pariwisata belum menjadi sumber penghasilan utama. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan, area parkir, fasilitas sanitasi, serta keterbatasan anggaran desa masih menjadi faktor yang memengaruhi pengembangan destinasi wisata. Dari aspek kelembagaan, koordinasi antar pemangku kepentingan masih memerlukan penguatan agar implementasi program dapat berjalan secara konsisten.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata memerlukan pendampingan yang berkelanjutan dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kali kegiatan pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, serta komunitas lokal dalam bentuk pendampingan lanjutan, penguatan kelembagaan Pokdarwis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur pendukung, serta penyusunan strategi pemasaran digital yang lebih komprehensif. Dengan dukungan tersebut, Desa Wisata Salawu memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.



Gambar 1. Kegiatan PkM



Gambar 2. Kegiatan PkM



Gambar 3. Kegiatan PkM

Simpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Wisata Salawu berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami konsep desa wisata berbasis masyarakat, penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan wisata, penyusunan paket wisata, serta pemanfaatan pemasaran digital sebagai strategi promosi destinasi. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat dalam merumuskan strategi pengelolaan desa wisata yang lebih terarah dan berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan

keterampilan peserta, terutama dalam aspek tata kelola, pelayanan wisata, pengembangan produk wisata, serta pemanfaatan media digital untuk mendukung promosi destinasi.

Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi awal mengenai penguatan tata kelola kelembagaan dan pengembangan strategi pemasaran yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan Desa Wisata Salawu. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan membuktikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan desa wisata yang efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditindaklanjuti, terutama terkait peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, penguatan kapasitas kelembagaan Pokdarwis, optimalisasi promosi digital, serta pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat untuk melanjutkan program pendampingan, memperkuat implementasi tata kelola desa wisata, serta mengembangkan inovasi produk wisata berbasis potensi lokal. Keberlanjutan kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadikan Desa Wisata Salawu sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat yang memiliki daya saing, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberi kita karunia dan kesehatan hingga akhirnya kami semua dapat bersilaturahmi. Kami mengucapkan terimakasih kepada aparat Desa Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang telah mengizinkan kami berbagi ilmu, mudah mudahan ilmu yang telah diberikan berkah dan bermanfaat untuk kita semua aamiin yaa rabb. Terimakasih kami ucapkan juga kepada seluruh tim pada program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang telah membantu mensukseskan acara ini.

Referensi

- Aryadi, R. D. (2022). Analisis pengembangan desa wisata sebagai best practice penggunaan dana desa untuk mewujudkan good governance dan collaborative governance. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.13213>
- ASEAN Secretariat. (2022). *ASEAN Community Based Tourism Standard*. ASEAN Secretariat. <https://asean.org>
- Budiarta, I. P., & Suardana, I. W. (2023). *Community empowerment model in sustainable tourism village development*. *Journal of Tourism Sustainability*, 3(1), 15–27.
- Goodwin, H. (2023). *Responsible tourism: Using tourism for sustainable development* (3rd ed.). Goodfellow Publishers.
- Herlambang, A. R., Subarsono, A., & Herwiyanti, E. (2023). Collaborative governance in tourism development (Study in Karangsalam Banyumas Tourism Village). *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(10), 4685–4695. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-03>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pengelolaan desa wisata berkelanjutan*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Lubis, H., Rohmatillah, N., & Rahmatina, D. (2020). Strategy of tourism village development based on local wisdom. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 320–329. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.22385>

- Nurwanda, A., Daraba, D., Suprajogo, T., & Puspita, D. (2024). Collaborative governance in tourism village development in Ciamis Regency, West Java Province, Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 118–131. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1149>.
- Nugroho, I., Negara, P. D., & Yuniar, H. R. (2023). Sustainable community-based tourism development in Indonesia: A systematic literature review. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 49(2), 683–691.
- Rahmawati, E., & Fandeli, C. (2024). Strengthening tourism village governance through community participation. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 18(1), 35–49.
- Sulaiman, A. I., Chusmeru, C., Adi, T. N., & Runtiko, A. G. (2022). Community empowerment as socio-economic education of tourism villages based on local wisdom. *Education Quarterly Reviews*, 5(3), 238–247. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.03.524>.
- Sutiarso, M. A., & Manaf, A. (2023). Digital marketing strategy for tourism village development in Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 11(2), 95–108.
- United Nations Development Programme. (2022). *Community-based tourism and local economic development*. UNDP. <https://www.undp.org>
- United Nations World Tourism Organization. (2023). *Tourism for rural development: A policy perspective*. UNWTO. <https://www.unwto.org>
- Wisnumurti, A., Candranegara, I., Suryawan, D. K., & Wijaya, I. (2020). Collaborative governance: Synergy among the local government, higher education, and community in empowerment of communities and management of potential tourism village. In *Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019)* (pp. 115–120). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.024>
- Wulandari, B., Rokhmawan, T., & Dewi, A. C. (2023). Initiating an educational agricultural flower tourism village through the construction of language landscape and eco folklore. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 122–132. <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.756>
- Zainal, Z., Rahman, A., & Herman, H. (2022). Tourism village development strategy in Mallari Village, Awangpone District, Bone Regency. *Jurnal Ad'ministrare*, 9(2), 243–252. <https://doi.org/10.26858/ja.v9i2.40975>